
Laporan Keuangan

Semester II

BKHIT RIAU
Badan Karantina Indonesia
Tahun 2024

Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) 2024

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Riau

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024



Jl.Patimura No.10

Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pekanbaru, 31 Desember 2024

Kepala Balai



Ir. Turhadi Noerachman, M.Si
NIP. 196712061992031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan	1
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	1
III Laporan Operasional	2
IV Laporan Perubahan Ekuitas	2
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	8
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	17
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	19
B.2.2 Belanja Barang	20
B.2.3 Belanja Modal	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	23
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Persediaan	
C.3 Persediaan yang Belum Diregister	
C.4 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.5 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.6 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.8 Tanah	
C.9 Peralatan dan Mesin	
C.10 Gedung dan Bangunan	
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.13 Uang Muka dari KPPN	
C.14 Ekuitas	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	28
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	
D.6 Beban Perjalanan Dinas	
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
E.1 Ekuitas Awal	

E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	38
VI.	Lampiran dan Daftar	



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
RIAU

Jln. Pattimura No.10 Pekanbaru, Riau 28131 Telp. (0761) 22172
www.karantinaindonesia.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2024 Unaudited Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 31 Desember 2024

Kepala Balai



Ir. Turhadi Noerachman, M.Si
NIP. 196712061992031001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Riau Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.429.978.292,- berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.429.978.292,- atau mencapai 168,96,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp7.356.580.000,-.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.982.695.293 atau mencapai 98,02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp22,427,119,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 6.455.167.34 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp296.749.877,-; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.158.417.466,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp41.490.351,- dan Rp6.413.676.992,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12,429,808,292,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp21,382,653,130,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-8,952,844,838,-, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing- masing sebesar Rp.185.000 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-8,952,659,838,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-8,952,659,838,- kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15,366,336,830,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6,413,676,992,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023**

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	7,356,580,000	12,429,978,292	168.96	-
JUMLAH PENDAPATAN		7,356,580,000	12,429,978,292	168.96	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	9,064,757,000	9,058,750,157	99.87	-
Belanja Barang	B.2.2	12,842,542,000	12,407,270,136	98.28	-
Belanja Modal	B.2.3	519,820,000	516,675,000	96.65	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		22,427,119,000	21,982,695,293	98.92	-

Pekanbaru, 31 Desember 2024
Kepala Balai



Ir. Turhadi Noorachman, M.Si
NIP. 196712061992031001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1	5,000	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2	(75)	
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.3	14,925	
Persediaan	C.4	296,734,952	-
Jumlah Aset Lancar		296,749,877	-
ASET TETAP			
Tanah	C.5	3,030,732,000	-
Peralatan dan Mesin	C.6	2,166,188,833	-
Gedung dan Bangunan	C.7	3,319,475,829	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8	176,277,000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(2,534,256,196)	-
Jumlah Aset Tetap		6,158,417,466	-
JUMLAH ASET		6,455,167,343	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	41,490,351	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		41,490,351	-
JUMLAH KEWAJIBAN		41,490,351	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	6,413,676,992	-
JUMLAH EKUITAS		6,413,676,992	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6,455,167,343	-

Pekanbaru, 31 Desember 2024

Kepala Balai



Ir. Turhadi Noerachman.M.Si
NIP. 196712061992031001

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	12,429,808,292	-
Jumlah Pendapatan		12,429,808,292	-
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	9,058,750,157	-
Beban Persediaan	D.3	1,227,050,480	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,253,580,272	-
Beban Pemeliharaan	D.5	2,423,818,170	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4,270,812,526	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	148,641,450	-
Jumlah Beban		21,382,653,130	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		11.064.445.695)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	185,000	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		185,000	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(8,952,659,838)	-
Pos Luar Biasa			
POS LUAR BIASA	D.15	-	-
Beban Luar Biasa	D.16	-	-
POS LUAR BIASA	D.17	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(8,952,659,838)	-

Pekanbaru, 31 Desember 2024
Kepala Balai


 Ir. Turhadi Noerachman.M.Si
 NIP. 196712061992031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN
31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	(8,952,659,838)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	15,366,336,830	-
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		6,413,676,992	-
EKUITAS AKHIR	E.6	6,413,676,992	-

Pekanbaru, 31 Desember 2024

Kepala Balai



Ir.Turhadi Noerachman,M.Si
NIP.196712061992031001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai Visi : “Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat melaksanakan tugas di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu juga memiliki makna bahwa Barantin diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT).

MISI :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati,
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan,
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya. .

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Riau

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUTANSI

Basis Akuntansi

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	5.928.000.0000
Jumlah Pendapatan	-	5.928.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	8.375.620.000	9,064,757,000
Belanja Barang	12.192.340.000	12,842,542,000
Belanja Modal	320.000.000	519,820,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	20.887.960.000	22,427,119,000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.12.429.978.292

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 12,429,978,292 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 7,356,580,000 . Pendapatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Riau terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp.0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.12.429.978.292. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Realisasi Pendapatan TA 2024 tidak mengalami Kenaikan atau pun penurunan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan Karena BKHIT Riau Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,356,580,000	12,429,978,292	-
Jumlah	-	12,429,978,292	-

Realisasi Penerimaan Pajak tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,429,978,292	-	-
Jumlah	12,429,978,292	-	-

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp.12,429,978,292

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.12,429,978,292 dan Rp.0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2023. Hal ini disebabkan Karena BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	12.429.978.292	-	-
Jumlah	12,429,978,292	-	-

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	26.500.000	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	11.873.399.295	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	88.404.000	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	441.489.997	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185.000	-	-
Jumlah	12.429.978.292	-	-

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Rp.21,982,695,293*

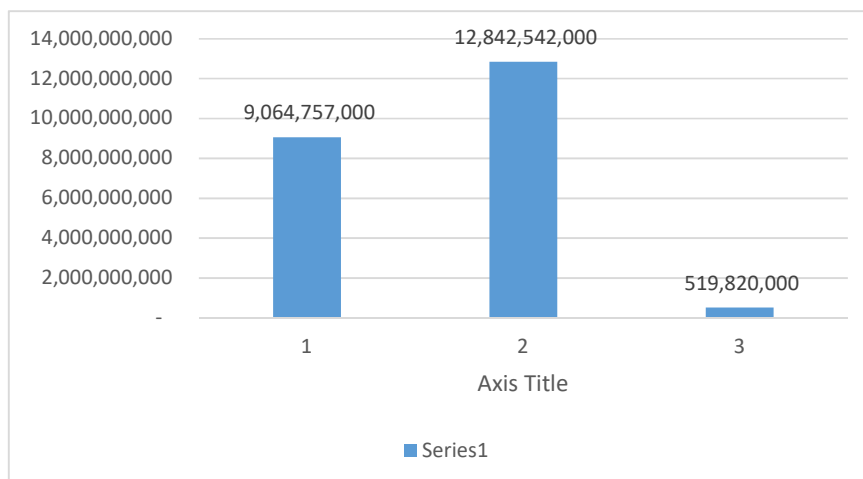
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp.21,982,695,293 atau 98,02% dari anggaran belanja sebesar Rp.22,427,119,000 . Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	9,064,757,000	9,058,750,157	99,87
Belanja Barang	12,842,542,000	12,407,270,136	98,28
Belanja Modal	519,820,000	516,675,000	96,65
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	22,427,119,000	21,982,695,293	98,02

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 tidak mengalami Kenaikan/Penurunan. Hal ini disebabkan karena BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	9,058,750,157	-	-
Belanja Barang	12,407,270,136	-	-
Belanja Modal	516,675,000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	21,982,695,293	-	-

B.2.1 Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp.9,058,750,157*

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.9,058,750,157 dan Rp.0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena BKHIT RIAU merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru dilaksanakan tahun 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.694.089.060	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	70.897	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	353.829.910	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	106.658.900	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	19.620.000	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	665.112.000	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	51.873.088	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	269.619.660	-	-
Belanja Uang Makan PNS	671.928.000	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	41.535.000	-	-
Belanja Uang Lembur	1.998.354.000	-	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	105.483.000	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.896	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.516.100	-	-

Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.406.440		
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.600.000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.083.280	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	19.985.00	-	-
Belanja Uang Lembur PPPK	41.988.000	-	-
Jumlah Belanja kotor	9.063.755.231	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	5.005.074	-	-
Jumlah Belanja	9.058.750.157	-	-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang
Rp.12,407,270,136

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.12,407,270,136 dan Rp.0. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi belanja barang TA 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun pun penurunan dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara karena BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	2.558.732.340	-	-
Belanja Barang Non Operasional	529.100.452	-	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.507.550.530		
Belanja Jasa	1.167.256.118	-	-
Belanja Pemeliharaan	2.373.818.170	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.270.812.526	-	-
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	12.407.270.136	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	12.407.270.136	-	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal
Rp.516,675,000

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.516,675,000 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun pun penurunan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppress 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	516.675.000	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Jumlah Belanja Kotor		-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	516,675,000	-	-

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.516,675,000 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun pun penurunan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppress 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	516,675,000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	516,675,000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	516,675,0000	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2023.

Realisasi
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.516,675,000

Realisasi
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.0

Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Balai Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Riau sampai dengan 31 Desember.2024 tidak terdapat alokasi pagu dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Utama Badan Karantina Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) BA.127.01.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Realisasi Belanja
Modal, Jalan,
Irigasi dan
Jaringan Rp.0*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun pun penurunan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi &
Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Uang Muka dari KPPN		
TUP PNBPN		
Jumlah		

C.2 Persediaan

*Persediaan
Rp.296,734,952*

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.296,734,952 dan Rp.0 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	296,734,952	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	296,734,952	-

Persediaan tersebut diatas dalam :

- Saldo ATK	Rp.	0
- Pembelian ATK	Rp.	1.507.550.530
- Transfer Masuk Sertifikat	Rp.	66.234.902
		-----+
	Rp.	1.573.785.432

Mutasi Transaksi Pengurangan adalah :

- Habis Pakai	Rp.	1.277.050.480
		----- -
Total Persediaan	Rp.	296.734.952

- Dalam Persediaan terdapat Transfer Masuk Persediaan berupa Dokumen sertifikasi Kesehatan yang berasal dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru sejumlah 27.500 dan persediaan sertifikat ini akan dihapuskan karena kebijakan Barantin. Dan kedepannya akan menggunakan Sertifikat elektronik.

Tanah
Rp.3,030,732,000

C.3 Tanah

Nilai Aset berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.3,030,732,000 yang dan Rp.0. Nilai Tanah tersebut berasal dari Tranfer Masuk dari Kementerian Kelautan sesuai dengan BAST Barang Milik Negara Nomor : 932/SJ/PL.450/XI/2024 tanggal 18 November 2024 berupa :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah :	
Transfer Masuk	3.030.732.000
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	3.030.732.000

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1			
2			
Jumlah			3.030.732.000

Peralatan dan Mesin
Rp.2,166,188,833

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.2,166,188,833 dan Rp.0. Nilai Peralatan dan Mesin dan Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	516.675.000
Transfer Masuk	1.649.513.833
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	2.166.188.833
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.584.210.200)

Nilai Buku per 31 Desember 2024	581.978.633
--	-------------

Mutasi transaksi penambahan Peralatan dan mesin dari Pembelian Berupa :

Terdapatnya mutasi tambah dari peralatan dan Mesin berupa :

1. Alat angkut senilai Rp. 173.522.025,
2. Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 810.995.000,
3. Alat Studio komunikasi dan pemancar senilai Rp. 24.205.000,
4. Alat kedokteran dan Kesehatan senilai Rp. 30.000.000,
5. Alat Laboratorium senilai Rp. 966.678.750,
6. Komputer senilai Rp156.338.058
7. PeralatanProses / Produksi berupa transfer masuk dari karantina ikan senilai Rp. 4.450.000

C.5 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp.3.319.475.829*

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.319.475.829 dan Rp.0. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	3.319.475.829
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2024	3.319.475.829
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(842.479.851)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.476.995.978

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

1. Rp. 291.021.000 (Dua ratus sembilan puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) berupa transfer masuk pagar permanen sebanyak 3 unit dari Karantina Ikan ke BKHIT Riau.
2. Rp. 3.028.454.829 (Tiga milyar dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) berupa transfer Gedung dan Bangunan sebanyak 7 unit dari Karantina Ikan ke BKHIT Riau.

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp.176.277.000*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.176.277.000 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
---	---

Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	176.277.000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	176.277.000
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2024	(107.566.145)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	68.710.855

Mutasi tambah atas nilai Tugu Kontrol senilai 176.277.000 terdiri dari:

1. Transfer masuk pagar permanen sebanyak 1 unit seluas 598 M2 senilai 92. 629.000,-
2. Transfer masuk pagar permanen sebanyak 1 unit seluas 6 M2 dari karantina ikan ke BKHIT Riau senilai Rp. 83.648.000,-

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.2.534.256.196*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.2.534.256.196 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.166.188.833	(1.584.210.200)	581.978.633
2	Gedung dan Bangunan	3.319.475.829	(842.479.851)	2.476.995.978
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.277.000	(107.566.145)	68.710.8558
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		5.661.941.662	(2.534.256.196)	3.127.685.466

C.8 Utang Pada Pihak Ketiga

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp. 41.490.351*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp41.490.351 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

1. Tagihan Listrik per 31 Desember 2024 senilai Rp 33.636.330,- sudah di bayarkan dengan nomor SP2D

250081301000084 Tanggal 17 Januari 2024.

2. Tagihan Telpon per 31 Desember 2024 senilai Rp. 1.432.122,- sudah dilakukan pembayaran dengan diterbitnya nomor SP2D 250081301000075 Tanggal 17 Januari 2024.
3. Tagihan Air per 31 Desember 2024 senilai Rp. 1.386.100,- sudah dilakukan pembayaran dengan nomor SP2D 250081302000430 tanggal 10 Februari 2024.
4. Tagihan Internet per 31 Desember 2024 senilai Rp. 5.035.799,- sudah dilakukan pembayaran dengan diterbitnya nomor SP2D 250081301000078 Tanggal 17 Januari 2024.

C.9 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp.0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

C.9 Ekuitas

Ekuitas
Rp 6.413.676.992

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.413.676.992 dan Rp.0.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp. 12,429,808,292*

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 12,429,808,292 dan Rp.0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2023. Hal ini disebabkan Karena BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppress 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024 . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan
(Unaudited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	26.500.000	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	-88,404,000	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	-11,873,414,295	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	441.489.997	-	-
Jumlah	12,429,808,292	-	-

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp. 9,058,750,157*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing masing sebesar Rp. 9,058,750,157 dan Rp.0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Realisasi Pendapatan TA 2024 tidak mengalami Kenaikan atau pun penurunan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Karena BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppress 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.694.089.060	-	-
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-2.222.200		
Beban Pembulatan Gaji PNS	70.897	-	-
Pengembalian Beban pembulatan Gaji PNS	-2.874		
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	353.829.910	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	106.658.900	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	19620.000	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	665.112.000	-	-
Pengembalian Beban Tunjangan Fungsional PNS	-1.120.000		
Beban Tunj. PPh PNS	51.873.088	-	-
Beban Tunj.Beras PNS	269.619.660	-	-
Beban Uang Makan PNS	671.928.000	-	-
Beban Tunj.Umum PNS	41.535.000	-	
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-1.660.000		
Beban Gaji Pokok PPPK	105.483.000	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.896	-	
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	3.516.100	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.406.440		
Beban Tunj. Fungsional PPPK	12.600.000	-	-
Beban Tunj.Beras PPPK	6.083.280	-	-
Beban Uang Makan PPPK	19.985.000	-	-
Beban Uang Lembur	1.998.354.000	-	-
Beban Uang Lembur PPPK	41.988.000	-	-
Jumlah	9,058,750,157	-	-

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp. 1,227,050,480*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,227,050,480 dan Rp.0

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023.

Hal ini disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi dan BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	1,227,050,480	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	1,227,050,480	-	-

Beban persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.227.050.480 sedang nilai realisasi belanja senilai Rp.1.227.050.480 sehingga tidak terdapat selisih antara beban persediaan dengan realisasi belanja persediaan pada Balai Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Riau

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp. 4,253,580,272*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,253,580,272 dan Rp.0.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.975.577.195	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	419.520.000	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	26.291.145	-	-

Beban Honor Operasional Satuan Kerja	137.344.000	-	-
Beban Bahan	490.825.452	-	-
Honor Output Kegiatan	31.200.000		
Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.075.000		
Beban Langganan Listrik	427.161.422	-	-
Beban Langganan Telepon	14.573.372	-	-
Beban Langganan Air	6.202.400	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	147.610.532	-	-
Beban Sewa	129.937.000	-	-
Beban Jasa Profesi	5.200.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	435.062.754	-	-
Jumlah	4,253,580,272	-	-

Tidak terdapat selisih antara beban barang dan jasa dengan realisasi belanja barang dan jasa pada Balai Karantina Hewan Dan Tumbuhan Riau

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp. 2,423,818,170*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2,423,818,170 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 tidak mengalami kenaikan/Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023, dimana Anggaran dengan BA 127 Baru di laksanakan tahun 2024. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	807.393.000	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29.338.000		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.471.540.170	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	65.547.000	-	-

Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	50.000.000		
Jumlah	2,423,818,170	-	-

Terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan realisasi belanja pemeliharaan per 31 Desember 2024 pada Balai Karantina Hewan Dan Tumbuhan Riau sehingga selisih senilai Rp.50.000.000 berupa beban persediaan bahan pemeliharaan berupa barang habis pakai karena ada nya kesalahan kode barang.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp. 4,270,812,526*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,270,812,526 dan Rp.0

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen disebabkan oleh BKHIT RIAU Merupakan Satker Baru dari Badan Karantina Indonesia (BA 127) Yang Baru Terbentuk Sesuai Peppers 45 TA.2023. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	2,687,815,984	-	-
Beban Perjalanan Tetap	461,280,000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	64,200,000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	602,065,816	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	455,450,726	-	-
Jumlah	4,270,812,526	-	-

Tidak terdapat selisih antara beban perjalanan dinas dengan realisasi belanja perjalanan dinas.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 148,641,450*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 148,641,450 dan Rp.0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	110,487,114	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37,158,526	-	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	995,810	-	-
Jumlah	148,641,450	-	-

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp. 75*

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp75 dan Rp0. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	75	-	-
Jumlah	75	-	-

D.9 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp.185.000*

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.185.000 dan Rp.0.

*Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan
(Unaudited) TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185.000	-	-
Jumlah	185.000-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp.0,00*

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

E.2. Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
Rp. -8,952,659,838,-*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.-8,952,659,838 ,00 dan Rp.0,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00*

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp.0,00*

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,00*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp.0,00*

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset

*Selisih Revaluasi
Aset Rp.0,00*

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp.0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp.15,366,336,830

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 15,366,336,830 dan Rp.0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	21,982,695,293
Diterima dari Entitas Lain	-12,429,978,292
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	5,813,619,829
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	15,366,336,830

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 21.982.695.293 Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember

2024, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 12,429,978,292 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.739.882.063 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Sertifikat	Sekretariat Utama	66.234.902
Tanah	Karantina Ikan	3.030.732.000
Peralatan dan Mesin	Karantina Ikan	1.649.513.833
Gedung dan Bangunan	Karantina Ikan	3.319.475.829
Jaringan	Karantina Ikan	176.277.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Karantina Ikan	(1.584.210.200)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Karantina Ikan	(842.479.851)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Karantina Ikan	(107.566.145)
Jumlah		4.739.882.063

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.6,413,676,992

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.6,413,676,992 ,00 dan Rp.0,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Lain-lain

1. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Satker Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Riau terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 04 Ekonomi dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah Sebagai berikut :

Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 04 (Ekonomi) Program Prioritas, 03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, yang tersebar di BKHIT RIAU satuan Kerja dengan Pagu mencapai Rp.655.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 477.885.247 dengan Rincian sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga	: (018) Kementerian Pertanian
Unit Organisasi	: (12) Badan Karantina Pertanian
Satuan kerja	: (690873) Balai Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Riau
Fungsi	: (04) Ekonomi
Sub Fungsi	: (04.03) Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan)
Program	: Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Lokasi	: Riau

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output	%
04.Ekonomi	5.402.969.000	5.385.307.215	93,67				
03.Pertanian,Kehutanan,Perikanan dan Kelautan	5.402.969.000	5.385.307.215	93,67				
HA.Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	5.402.969.000	5.385.307.215	93,67				
Hasil Pemantauan	480.034.000	477.964.247	99.55				
Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan	381.484.000	380.340.645	99.70	Produk	3	3	100
Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK	98.550.000	97.544.602	98.98	Sertifikat	1	1	100

2. Bali Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau pada per 31 Desember 2024 sudah melakukan revisi 17 Kali selama Tahun 2024.

